



Penggunaan Media Sosial pada Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

INFO PENULIS

Muhammad Dimas Febriyan
Universitas Muhammadiyah Lampung
Indonesia
Dhimasfebrian19@gmail.com

Eny Inti Suryani
Universitas Muhammadiyah Lampung
Indonesia
enyintisuryani@gmail.com

Putri Rahmaini
Universitas Muhammadiyah Lampung
Indonesia
Rahmaini34@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Febriyan, M. D., Suryani, E., & Rahmaini, P. (2025). Penggunaan Media Sosial pada Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2135-2149.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan media sosial pada partisipasi pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena yang menjadi penghalang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yaitu kurangnya kesadaran politik, minimnya pengetahuan tentang proses Pilkada, dan pengaruh lingkungan dan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok menjadi media yang paling sering digunakan pemilih pemula untuk mengakses informasi politik. Namun, intensitas penggunaan media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi politik. Masih banyak pemilih pemula yang hanya menjadi pengamat pasif dan belum memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Partisipasi politik melalui media sosial terlihat dalam bentuk membagikan konten kampanye, menyukai dan mengomentari unggahan politik, serta keterlibatan dalam percakapan di grup pertemanan. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi politik, kekhawatiran terhadap stigma sosial, dan minimnya ruang diskusi yang aman. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak seperti sekolah, pemerintah, dan komunitas untuk mendorong literasi digital dan menciptakan ruang yang inklusif agar pemilih pemula dapat lebih terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal.

Kata Kunci: Media Sosial, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pilkada

Abstract

This study aimed to describe the use of social media in the participation of first-time voters in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Penengahan Sub-district, Kedaton District, Bandar Lampung City. The background of this study was based on phenomena that hindered the improvement of young voter participation, namely the lack of political awareness, limited knowledge about the electoral process, and the influence of family and social environment. This research used a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, which were then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data was strengthened through source triangulation. The results of the study showed that social media platforms such as Instagram, WhatsApp, and TikTok were the most frequently used by first-time voters to access political information. However, the intensity of social media use did not always correlate with the quality of political participation. Many young voters remained passive observers and lacked the courage to express their political opinions openly. Political participation through social media appeared in the form of sharing campaign content, liking and commenting on political posts, and engaging in discussions within friendship groups. Nevertheless, obstacles such as low political literacy, fear of social stigma, and the lack of safe discussion spaces persisted. Therefore, active roles from various parties such as schools, the government, and communities were needed to promote digital literacy and create inclusive spaces so that first-time voters could become more actively involved in the local democratic process.

Keywords: Social Media, Political Participation, First-Time Voters, Regional Head Election

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem politik yang diidam-idamkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara demokratis, Indonesia memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada rakyatnya dengan memberi peluang bagi mereka guna berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, menyampaikan pendapat, dan mendirikan organisasi yang memiliki dampak positif bagi masyarakat (Arumsari, 2018 : 63).

Di era globalisasi saat ini, pemerintah menghadapi berbagai tantangan disrupsi digital, sehingga diperlukan strategi penyiapan sumber daya manusia yang unggul agar dapat bersaing dengan negara-negara maju (Suryani & Stiawati, 2024 : 41). Demokrasi dan media sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi membutuhkan saluran bagi setiap individu untuk menyampaikan suara serta menjalankan hak dan kewajiban politiknya. Kebutuhan ini muncul sebagai bagian dari fitrah demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga negara dalam mengekspresikan hak asasi mereka, khususnya dalam bidang politik. Sementara media sosial, sebagai produk dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, menyediakan ruang luas untuk menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat. Platform ini menjadi wadah terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, selama memiliki kemampuan menggunakan perangkat teknologi yang terus berkembang (Musa Karim., 2020 : 117).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan landasan hukum yang jelas terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Undang-Undang ini mengatur segala hal mengenai pemilu, termasuk hak pilih warga negara, serta tata cara penyelenggaraan dan pengawasan proses pemilihan. Dengan adanya UU ini, rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin daerah, sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi inilah Pemilihan Umum masih dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang bentuknya paling konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya yaitu bentuk partisipasi melalui media sosial yang banyak digunakan (N. Arumsari, 2020 : 13).

Keterbukaan yang ditawarkan oleh media sosial saat ini telah dimanfaatkan secara sadar oleh berbagai pihak. Banyak lembaga pemerintah yang kini memiliki akun resmi di berbagai platform media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat. Para politisi pun memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi politik serta strategi untuk menjangkau dukungan menjelang pemilu. sebagian besar partai politik kini lebih banyak melakukan sosialisasi dan kampanye politik melalui media sosial. Hal ini sangat relevan karena media

sosial banyak digunakan oleh kalangan remaja yang merupakan pemilih pemula (Musa Karim., 2020 : 117).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi. Semakin besar partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat aktif memperhatikan, memahami, dan terlibat dalam urusan negara. Di sisi lain, kurangnya partisipasi politik sering kali menunjukkan bahwa masyarakat tidak memberikan perhatian atau minat yang cukup terhadap isu-isu atau aktivitas yang berhubungan dengan negara. Minimnya partisipasi politik masyarakat tercermin dari keberadaan golongan putih (golput) dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu, mengkaji tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu menjadi hal yang sangat penting, karena tingkat partisipasi yang tinggi atau rendah mencerminkan sejauh mana proses demokrasi berjalan dan seberapa baik kedaulatan rakyat terwakili (Wardhani, 2018 : 58).

Pelaksanaan pemilihan umum, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, memerlukan keterlibatan semua anggota masyarakat. Keterlibatan dalam politik sangat krusial karena setiap suara dianggap mempunyai kemungkinan untuk menjadi penentu arah masa depan suatu negara, sehingga bisa menggambarkan semangat konstitusi demi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat untuk mencapai demokrasi lokal yang baik. Bentuk keterlibatan politik dapat berupa memberikan suara pada pemilihan umum, menjadi pengawas dalam proses pemilihan, mengadakan penyuluhan pemilu di tengah masyarakat, serta berpartisipasi secara aktif selama jalannya pemilihan umum (Awaliah, 2023 : 1088).

Pilkada 2024 akan menjadi titik penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula yang akan ikut serta untuk pertama kalinya dalam proses pemilihan umum. Pengertian pemilih pemula menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV pasal 198 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin yang mempunyai hak memilih. Keterlibatan pemilih pemula sangat penting karena mereka merupakan generasi muda yang memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah, serta masa depan demokrasi di Indonesia.

Partisipasi pemilih pemula saat ini cenderung lebih terbuka dan dipengaruhi oleh intensitas penggunaan media sosial. Media sosial membuat mereka lebih sering membicarakan isu politik dan tertarik mengikuti perkembangan terbaru. Namun, di sisi lain, masih banyak anak muda yang bersikap skeptis terhadap politik, baik karena malas, tidak peduli, atau tidak percaya pada sistem politik, sehingga memilih untuk golput (Suryo & Aji, 2020 : 88).

Pemilih pemula sering kali dianggap sebagai kelompok yang masih perlu pembinaan dan pengembangan agar dapat memahami dan terlibat lebih aktif dalam politik. Sebagai kelompok yang baru ikut serta dalam proses pemilihan untuk pertama kalinya, mereka umumnya terdiri dari mahasiswa dan pekerja muda yang baru memulai perjalanan politik mereka. Selain itu, usia remaja yang cenderung labil dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal politik, menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan partisipasi mereka.

Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang unik. Di Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, masyarakat memiliki beragam latar belakang yang mencakup pelajar, pekerja, hingga pengusaha. Kelurahan ini dikenal sebagai kawasan strategis dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya di kalangan pemilih pemula, tetap ada.

Salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bernama Afriyeni, mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi penghalang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yaitu kurangnya kesadaran politik, minimnya pengetahuan tentang proses Pilkada, dan pengaruh lingkungan dan keluarga. Uraian tersebut dapat menjadi tantangan besar dalam meningkatkan penggunaan media sosial dalam partisipasi politik di kalangan pemilih pemula. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi mengenai signifikansi Pilkada, agar pemilih pemula dapat lebih menyadari hak serta kewajiban mereka dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini akan menganalisis penggunaan media sosial dalam partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara menyeluruh fenomena, perilaku, dan peristiwa terkait subjek studi mengenai keterlibatan pemilih muda dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pendapat Moleong, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai fenomena yang dialami oleh individu yang sedang diteliti, mencakup aspek seperti perilaku, perspektif, motivasi, serta tindakan secara keseluruhan. Penelitian ini menyajikan penjelasan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang relevan dengan konteks yang ada, sekaligus menerapkan berbagai metode yang bersifat alami (Nasution, 2023 : 34).

Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu pemilih pemula, anggota Panwaslu, dan aparat desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu strategi yang bertujuan untuk mencocokkan dan memastikan akurasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan pemilih pemula sehubungan dengan keterlibatan pemilih pemula dalam Pilkada 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan Sosial Pemilih Pemula dalam Konteks Politik

Media sosial kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari generasi muda. Kehadirannya tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang baru bagi pemuda untuk mengakses informasi, membentuk opini, serta menyampaikan pandangan terhadap isu-isu sosial dan politik. Hal ini juga berdampak langsung pada cara mereka menyikapi proses politik, termasuk dalam momentum Pilkada 2024.

Bagi pemilih pemula, media sosial sering kali menjadi sumber utama informasi politik. Tidak sedikit dari mereka yang mengetahui profil calon, visi-misi, dan program kerja pasangan calon kepala daerah justru dari unggahan di Instagram, TikTok, YouTube, atau status WhatsApp. Akses yang cepat dan konten yang menarik membuat media sosial lebih diminati dibandingkan media konvensional. Salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bernama Afriyeni Kelurahan Penengahan, menjelaskan bahwa media sosial menjadi salah satu kanal utama dalam menyosialisasikan pentingnya pemilu dan pengawasan partisipatif.

“Kami buat konten edukatif di Instagram, dan juga aktif di grup-grup WhatsApp kelurahan. Tapi memang, partisipasi dari pemilih muda belum maksimal.”

Menurut Afriyeni, hambatan utama dalam memaksimalkan media sosial sebagai sarana edukasi politik adalah rendahnya literasi digital dan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Panwaslu juga menyatakan bahwa belum semua pemilih pemula mengetahui hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi. Panwaslu telah mencoba menjangkau pemilih pemula melalui kampanye digital, namun keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi tantangan tersendiri. Ia berharap ke depan bisa dilakukan kolaborasi dengan komunitas pemuda atau sekolah untuk edukasi politik berbasis media sosial. Sementara itu, Susanto salah satu aparat Kelurahan Penengahan, menekankan bahwa pihak kelurahan menyadari pentingnya media sosial sebagai alat penyebaran informasi politik. Pihak kelurahan memanfaatkan grup WhatsApp dan media sosial resmi kelurahan untuk menyebarkan informasi pemilu.

“Kami dorong pemuda-pemuda di sini agar ikut aktif. Tapi memang belum semua mau atau paham pentingnya ikut pemilu.”

Menurut Susanto, budaya diskusi politik di ruang digital masyarakat masih rendah. Aparat desa baru sebatas menyebarkan informasi satu arah, dan belum sepenuhnya mampu memfasilitasi ruang komunikasi dua arah yang terbuka dan partisipatif di media sosial.

a. Partisipasi (Keikutsertaan)

Partisipasi dalam media sosial merupakan salah satu bentuk keterlibatan digital yang saat ini menjadi karakteristik generasi muda, termasuk pemilih pemula dalam Pilkada 2024. Aktivitas partisipatif ini dapat berupa membagikan konten kampanye, memberikan

komentar terhadap isu politik, menyukai unggahan politikus, maupun hanya sekadar mengamati informasi tanpa interaksi. Namun, intensitas dan bentuk partisipasi setiap individu berbeda-beda, bergantung pada tingkat literasi politik, kepercayaan diri, serta pengaruh dari lingkungan sosial mereka.

Bayu (18 tahun), salah satu informan siswa kelas XII SMA di Kelurahan Penengahan, menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam media sosial. Ia secara terbuka mendukung salah satu calon kepala daerah dengan aktif mengunggah konten kampanye melalui fitur story di Instagram dan WhatsApp. Selain itu, ia juga kerap berdiskusi dengan teman-temannya di kolom komentar, dan mengaku senang menjelaskan alasan dukungannya kepada orang lain. Bayu mengatakan:

“Saya sering posting poster atau video dari calon yang saya dukung. Kalau ada yang nanya, saya juga suka bantu jelaskan kenapa saya pilih dia.”

Namun, tidak semua pemilih pemula memiliki partisipasi yang sama aktifnya. Informan lain, Bagas (18 tahun), menyatakan bahwa dirinya hanya sebagai pengamat pasif di media sosial. Ia sering melihat unggahan kampanye politik, namun tidak tertarik untuk memberikan tanggapan atau membagikannya kembali. Bagas merasa belum cukup memahami politik secara mendalam, sehingga memilih untuk tidak terlibat secara langsung dalam percakapan politik di media sosial. Bagas mengatakan:

“Saya biasanya cuma lihat-lihat aja kalau ada yang posting soal Pilkada. Kadang baca juga komentarnya, tapi saya nggak berani ikut komen karena takut salah ngomong atau dikira ikut-ikutan. Lagian, saya juga belum terlalu paham soal politik.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Indah (18 tahun), Indah menyatakan bahwa meskipun ia mengikuti akun resmi pemilu dan beberapa konten politik di TikTok atau Instagram, ia enggan memposting atau menyatakan dukungan secara terbuka. Ia merasa khawatir jika pendapat politiknya menimbulkan perdebatan atau membuat dirinya tidak nyaman di lingkungan pertemanan. Indah mengatakan:

“Saya lebih pilih diam aja, takut dibilang sok tahu atau malah ribut gara-gara beda pilihan.”

b. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan dalam menyampaikan opini politik menjadi salah satu indikator penting dalam partisipasi demokrasi, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial dianggap memberikan ruang luas bagi siapapun untuk menyuarakan aspirasi politik, menyampaikan kritik terhadap kebijakan, maupun menunjukkan dukungan kepada calon tertentu. Namun, keterbukaan ini tidak selalu berjalan secara ideal di lapangan, khususnya bagi pemilih pemula.

Bayu, seorang pemilih pemula yang aktif di media sosial, mengaku tidak hanya menggunakan platform tersebut untuk membagikan informasi politik, tetapi juga merasa nyaman berbicara terbuka mengenai pendapat politiknya di ruang digital. Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak sebagai warga negara, selama dilakukan secara sopan dan tidak menyerang orang lain. Bayu mengatakan:

“Saya merasa nggak masalah terbuka soal pilihan saya. Kalau di media sosial, saya suka nulis opini pribadi, misalnya tentang program kerja calon. Teman-teman saya sih rata-rata saling menghargai, jadi nggak pernah ribut.”

Salah satu informan, Bagas (18 tahun), memiliki pandangan yang lebih hati-hati dalam menyikapi keterbukaan di media sosial terkait isu politik. Ia menyadari bahwa secara teknis media sosial memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat, namun secara psikologis tidak semua orang merasa nyaman untuk mengungkapkan pandangan politik secara terbuka. Bagas cenderung menghindari pembahasan politik karena khawatir akan dianggap memprovokasi atau sok tahu oleh lingkungan sekitarnya. Ia lebih memilih menjadi pengamat pasif dibandingkan ikut berpartisipasi dalam diskusi daring.

“Saya sebenarnya punya pendapat sendiri, tapi kalau di media sosial kayaknya nggak aman. Jadi saya lebih milih simpan buat diri sendiri aja.”

Indah (18 tahun), salah satu pemilih pemula, mengungkapkan bahwa dirinya merasa kurang nyaman dalam menyampaikan pendapat politik secara terbuka di media sosial. Ia menyebutkan bahwa selain belum memiliki keyakinan penuh terhadap pilihan politiknya, ia juga merasa bahwa lingkungan sosial di sekitarnya belum mendukung perbedaan pandangan.

“Saya pernah coba kasih tau soal calon yang saya dukung, tapi tanggapan teman saya kurang merespon. Jadi sekarang saya lebih milih diam aja. Takut salah ngomong, nanti dibilang sok tahu atau malah dijauhi.”

c. Percakapan (*Conversation*)

Interaksi di media sosial berkaitan erat dengan diskusi politik, yang merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi digital. Percakapan ini dapat berlangsung secara langsung maupun melalui forum daring, seperti kolom komentar, grup diskusi, atau pesan pribadi. Sayangnya, tidak semua pemilih pemula merasa nyaman untuk terlibat dalam percakapan politik yang terbuka. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kelurahan Penengahan, ditemukan bahwa intensitas percakapan seputar Pilkada masih tergolong rendah dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial serta kesiapan individu dalam menyampaikan opini.

Bayu, salah satu informan, menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi dalam diskusi politik. Ia aktif berdiskusi baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Baginya, berbagi pendapat merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai pemilih yang sadar akan peran politiknya. Bayu mengatakan:

“Saya sering diskusi sama teman-teman soal calon kepala daerah, terutama di grup kelas atau di Instagram. Kadang kami beda pilihan, tapi seru aja ngobrolin visi-misi mereka. Jadi makin ngerti.”

Sementara itu, Bagas, salah satu pemilih pemula memiliki pengalaman yang berbeda. Ia menyampaikan bahwa percakapan mengenai politik jarang terjadi di lingkungan pertemanannya. Menurutnya, topik politik masih dianggap sensitif atau bahkan membosankan oleh sebagian besar teman sebaya, sehingga sulit untuk memulai diskusi yang mendalam. Bagas mengatakan:

“Teman-teman saya lebih suka ngobrolin hal-hal ringan, kayak game atau hiburan. Kalau bahas politik, biasanya malah dianggap sok tahu atau langsung berubah jadi bahan bercandaan.”

Selanjutnya, Indah salah satu pemilih pemula mengungkapkan bahwa dirinya cukup tertarik mengikuti informasi seputar Pilkada, terutama melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Namun demikian, keterlibatannya masih terbatas pada peran sebagai pengamat. Ia jarang ikut berdiskusi, baik secara langsung maupun di ruang digital. Indah mengatakan:

“Saya sering lihat konten tentang Pilkada di Instagram, tapi nggak pernah ikut komentar. Saya pernah komen soal politik, tapi ada beberapa netizen bermunculan.”

d. Komunitas (*Community*)

Keberadaan komunitas yang aktif membahas isu politik masih sangat minim di kalangan pelajar, khususnya pemilih pemula di Kelurahan Penengahan. Meskipun media sosial dan internet memberikan akses luas terhadap informasi politik, namun ruang diskusi kolektif seperti komunitas atau forum tatap muka masih jarang dijumpai, terutama yang relevan dengan usia dan kebutuhan pelajar.

Bayu, salah satu informan, menyatakan bahwa dirinya belum tergabung dalam komunitas politik tertentu, namun pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh Panwaslu desa di balai kelurahan beberapa waktu lalu. Ia merasa kegiatan tersebut cukup bermanfaat untuk membuka wawasan, meskipun belum berlanjut menjadi diskusi rutin di lingkungan tempat tinggalnya. Bayu mengatakan:

“Waktu itu ada sosialisasi pemilu di balai kelurahan. Saya ikut karena diajak RT. Jadi lumayan ngerti soal pentingnya ikut nyoblos. Tapi setelah itu nggak ada lagi kegiatan lanjutannya. Di rumah juga nggak ada yang bahas, jadi paling saya cari info sendiri aja.”

Hal serupa dialami oleh Bagas, salah satu pemilih pemula yang belum pernah terlibat dalam komunitas yang membahas soal politik, di lingkungan tempat tinggalnya. Ia merasa pembahasan politik masih dianggap hal yang berat. Bagas mengatakan:

“Belum pernah ikut komunitas yang bahas pemilu. Teman-teman juga kayaknya belum. Jadi ya paling lihat dari media sosial aja.”

Selanjutnya, Indah salah satu pemilih pemula menyampaikan hal yang serupa. Ia mengaku pernah tertarik untuk memahami lebih jauh soal Pilkada, tetapi tidak menemukan ruang yang nyaman untuk bertanya atau berdiskusi. Karena itu, ia lebih memilih untuk tidak terlalu terlibat dan hanya mengikuti perkembangan secara sekilas.

“Kadang pengen tahu soal calon atau pemilunya, tapi bingung mau tanya ke siapa. Kalau lihat di media sosial malah suka ribut atau saling serang. Jadi ya, lihat-lihat aja sekilas terus lanjut scroll.”

e. Keterhubungan (*Connectedness*)

Media sosial telah menjadi sarana utama bagi pemilih pemula di Kelurahan Penengahan untuk mengakses berbagai informasi seputar Pilkada 2024. Platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp dianggap lebih praktis dan cepat dalam menyampaikan kabar terbaru dibandingkan media konvensional. Melalui media sosial, mereka dapat mengetahui profil calon kepala daerah, visi-misi, serta program kerja yang ditawarkan.

Bayu, salah satu informan, mengaku cukup aktif memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi politik. Ia mengikuti akun resmi penyelenggara pemilu di kabupaten dan juga beberapa media lokal yang rutin mengunggah konten seputar Pilkada. Baginya, keterhubungan dengan informasi politik menjadi lebih mudah karena semuanya bisa diakses melalui ponsel. Bayu mengatakan:

“Kalau saya biasanya lihat dari Instagram KPU kabupaten sama beberapa akun berita lokal. Kadang juga ada yang share lewat story. Cuma memang harus hati-hati, soalnya pernah juga lihat info yang ternyata nggak valid.”

Sementara Bagas salah satu pemilih pemula, cenderung menjadi pengguna pasif. Ia lebih sering menerima informasi secara sepintas dari unggahan yang muncul di beranda TikTok atau Instagram. Meskipun ia mengikuti beberapa akun politik, namun ia jarang memverifikasi kebenaran informasi yang diterimanya karena merasa informasi yang muncul sering kali tidak konsisten.

“Suka lihat video kampanye atau info soal calon di TikTok, tapi kadang beda-beda isinya. Jadi saya nggak tahu mana yang bener. Apalagi banyak yang komentarnya saling serang, jadi makin bingung.”

Hal serupa dialami oleh Indah salah satu pemilih pemula. Ia mengatakan bahwa media sosial memang sangat membantu dalam mengenali nama-nama calon dan program yang mereka usung. Namun, ia mengaku sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya sekadar opini atau bahkan hoaks. Karena itu, ia lebih memilih menyimpan informasi tersebut sendiri dan belum berani membagikannya ke orang lain. Indah mengatakan:

“Saya pernah baca soal janji program calon di TikTok, tapi setelah saya cari lagi ternyata nggak ada di berita resmi. Jadi saya sekarang lebih banyak baca aja, belum berani komentar atau sebar info, takut salah.”

2. Bentuk Partisipasi Pemilih Pemula

a. Keterlibatan dalam Kampanye

Salah satu bentuk partisipasi politik yang menonjol dalam konteks pemilu adalah keterlibatan individu dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pemilih pemula di Kelurahan Penengahan, tingkat keterlibatan dalam kampanye menunjukkan variasi yang cukup mencolok antar individu, terutama dalam ranah digital.

Bayu, salah satu informan, menunjukkan keterlibatan yang cukup aktif dalam kampanye, meskipun skalanya masih terbatas pada lingkup media sosial dan pergaulan sehari-hari. Ia mengaku secara sukarela membagikan ulang materi kampanye calon kepala daerah yang ia dukung di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Tidak hanya itu, Bayu juga menyatakan bahwa dirinya pernah mengajak beberapa teman untuk mengenali profil calon tersebut, terutama ketika ada diskusi santai di grup pertemanan. Bayu mengatakan:

“Saya sih nggak ikut tim sukses, cuma kalau ada info dari calon yang saya suka, saya share.”

Selanjutnya, Bagas salah satu pemilih pemula tidak menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan kampanye. Ia menyatakan belum merasa cukup percaya diri atau memiliki dorongan kuat untuk ikut mempromosikan calon tertentu. Bagi Bagas, kampanye politik masih terasa seperti sesuatu yang “jauh” dan belum menjadi bagian dari keseharian remaja seusianya. Ia cenderung melihat kampanye hanya sebatas baliho, video promosi di TikTok, atau poster di jalan. Bagas mengatakan:

“Kalau kampanye ya cuma lihat-lihat aja. Nggak pernah sampai nyebar-nyebar info. Soalnya juga belum tahu pasti calon yang bagus siapa.”

Hal serupa dirasakan oleh Indah sebagai pemilih pemula. Ia lebih memilih untuk tidak terlibat karena khawatir dianggap memihak dan takut menimbulkan perdebatan. Ia mengakui bahwa pernah memiliki keinginan untuk mendukung salah satu calon, namun urung dilakukan karena merasa tidak nyaman jika opini pribadinya ditanggapi negatif oleh orang lain.

“Saya pernah kepikiran buat repost info tentang salah satu calon karena programnya bagus, tapi saya ragu. Bukan karena nggak peduli, tapi takut ada yang salah paham.”

b. Keterlibatan dalam Memberikan Suara

Keterlibatan pemilih pemula dalam menggunakan hak suara merupakan indikator penting dalam mengukur partisipasi politik generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pemilih pemula di Kelurahan Penengahan telah menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Namun, tingkat pemahaman dan kesiapan dalam mengikuti proses pencoblosan berbeda-beda.

Bayu, salah satu pemilih pemula menyatakan bahwa ia sudah mengikuti proses pemungutan suara dan merasa cukup percaya diri karena sebelumnya telah mencari informasi mengenai prosedur pencoblosan. Ia juga mengungkapkan rasa senangnya karena ini merupakan pengalaman pertamanya berpartisipasi dalam pemilu secara langsung. Bagi Bayu, keterlibatan tersebut menjadi momen yang bermakna sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Bayu mengatakan:

“Waktu itu saya cari tahu dulu soal lokasi TPS dan cara nyoblos yang benar. Jadi pas hari H, saya udah siap dan nggak bingung lagi. Senang juga sih, soalnya ini pertama kalinya ikut milih langsung”

Sementara Bagas, salah satu pemilih pemula juga datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya, meskipun dengan persiapan yang lebih minim. Ia mengaku sempat merasa canggung karena tidak benar-benar memahami proses teknis pencoblosan, namun tetap hadir karena merasa itu bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Bagas mengatakan:

“Sempat bingung, takut salah waktu nyoblos. Tapi pas di TPS dikasih arahan terlebih dahulu.”

Sementara Indah sebagai pemilih pemula, justru merasa cukup antusias mengikuti proses Pilkada karena ini adalah pengalaman pertamanya memberikan suara secara langsung. Ia aktif mencari tahu melalui media sosial dan siaran berita lokal, meski tidak terlibat dalam kampanye atau diskusi terbuka. Baginya, menggunakan hak pilih adalah bentuk partisipasi yang sederhana namun penting.

“Senang sih bisa nyoblos pertama kali. Nggak ikut kampanye atau diskusi, tapi dari berita dan media sosial aku lumayan ngerti siapa aja calonnya. Jadi waktu ke TPS udah ada bayangan mau pilih siapa.”

c. Keikutsertaan dalam Mengawasi Pemilu

Partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk keterlibatan politik non-elektoral yang penting dalam menjaga integritas demokrasi. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk keterlibatan ini belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh para pemilih pemula di Kelurahan Penengahan, terutama karena keterbatasan informasi dan minimnya ruang keterlibatan yang disediakan secara terbuka bagi kelompok usia muda.

Bayu, salah satu pemilih pemula, menunjukkan kepedulian terhadap proses pemilu dengan memilih untuk tetap berada di TPS hingga proses penghitungan suara berlangsung. Meskipun tidak secara resmi tergabung dalam tim pengawas atau relawan pemilu, ia mengaku penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana proses perhitungan suara dijalankan secara terbuka. Bayu mengatakan:

“Saya memang sengaja nunggu sampai sore, karena pengen lihat juga cara ngitung suaranya. Ternyata rame juga, soalnya disaksikan bareng warga. Dari situ saya jadi tahu kalau penghitungan suara itu transparan dan bisa dilihat siapa aja.”

Sementara Bagas, mengaku tidak terlalu memperhatikan tahapan pengawasan secara khusus. Ia datang ke TPS hanya untuk menggunakan hak pilih, dan setelah itu langsung pulang. Meski begitu, ia sempat memperhatikan suasana di TPS dan merasa bahwa proses berlangsung tertib serta tidak ada kejadian yang mencurigakan.

“Nggak sempat ikut ngamatin lama-lama sih. Tapi waktu saya datang, suasananya aman, petugasnya juga keliatan profesional.”

Sementara itu, Indah menyampaikan bahwa dirinya belum pernah terlibat atau mendapat informasi mengenai pengawasan pemilu secara partisipatif. Ia menganggap pengawasan sebagai hal penting, namun merasa belum cukup diberdayakan untuk ikut ambil bagian.

“Saya tahu pentingnya ngawasin pemilu, biar jujur dan adil. Tapi saya sendiri belum tahu harus mulai dari mana.”

Pembahasan

1. Penggunaan Sosial Media Pemilih Pemula dalam Konteks Politik

Penggunaan media sosial oleh pemilih pemula menunjukkan bahwa platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp telah menjadi sumber informasi utama dalam mengenal calon kepala daerah serta memahami isu-isu politik lokal. Pemilih pemula cenderung lebih tertarik pada konten yang bersifat visual, singkat, dan interaktif, yang sesuai dengan karakteristik media sosial saat ini. Hal ini menandakan pergeseran dari pola konsumsi informasi politik yang bersifat konvensional ke arah digital yang lebih cepat, instan, dan mudah diakses.

Namun, efektivitas media sosial sebagai alat edukasi politik masih belum maksimal. Banyak pemilih pemula hanya menggunakan media sosial sebatas untuk mengetahui informasi dasar seputar Pilkada tanpa adanya pemahaman yang mendalam. Rendahnya literasi digital dan kesadaran politik menjadi hambatan utama yang menyebabkan media sosial belum mampu membentuk pemilih yang kritis dan sadar politik secara optimal.

Kondisi tersebut menguatkan pandangan dalam teori literasi media bahwa keberadaan media tidak serta merta menciptakan masyarakat yang cakap secara politik. Diperlukan adanya proses pendampingan, edukasi yang berkelanjutan, dan ruang-ruang diskusi yang mendukung, agar informasi yang tersebar di media sosial tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga dianalisis dan dikritisi secara aktif oleh pemilih pemula.

Selain itu, penggunaan media sosial oleh instansi pemerintahan setempat dan penyelenggara pemilu masih bersifat satu arah, yaitu hanya sebagai saluran informasi tanpa ada ruang partisipatif bagi pengguna. Minimnya interaksi dua arah menyebabkan banyak informasi tidak sampai secara utuh atau tidak dipahami dengan baik oleh pemilih muda. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan media sosial belum sepenuhnya menyentuh aspek partisipatif dan dialogis dalam konteks pendidikan politik.

Kesenjangan antara tingginya intensitas penggunaan media sosial dan rendahnya kualitas partisipasi politik pemilih pemula menunjukkan perlunya peran aktif dari berbagai pihak. Pemerintah kelurahan, lembaga pengawas pemilu, sekolah, serta komunitas pemuda perlu bekerja sama untuk membangun strategi literasi digital yang adaptif dan menyentuh kebutuhan pemilih pemula. Dengan demikian, media sosial dapat benar-benar menjadi ruang yang sehat, edukatif, dan inklusif dalam proses demokrasi, khususnya dalam konteks Pilkada.

a. Partisipasi (Keikutsertaan)

Partisipasi dalam media sosial merupakan salah satu bentuk keterlibatan digital yang saat ini melekat erat pada generasi muda, khususnya pemilih pemula dalam Pilkada 2024. Keikutsertaan ini mencakup berbagai aktivitas seperti membagikan konten kampanye, memberikan komentar terhadap isu politik, menyukai unggahan tokoh politik, hingga mengamati perkembangan politik tanpa berinteraksi langsung. Namun demikian, tingkat partisipasi ini sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti literasi politik, kepercayaan diri, serta pengaruh sosial dari lingkungan sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pemilih pemula menunjukkan keterlibatan yang aktif dengan cara mengunggah materi kampanye melalui fitur cerita (story) di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Mereka juga terlibat dalam diskusi melalui komentar, serta berani menyampaikan pandangan politik secara terbuka kepada rekan-rekannya. Bentuk partisipasi aktif ini menjadi cerminan dari keberanian individu dalam mengemukakan sikap politik sekaligus menggambarkan adanya kemampuan dalam mengolah dan menyampaikan informasi politik yang diperoleh dari media sosial.

Namun, di sisi lain, terdapat juga kelompok pemilih pemula yang bersikap pasif. Mereka cenderung hanya menjadi pengamat konten politik yang beredar tanpa merasa perlu untuk terlibat lebih jauh. Sikap ini dilatarbelakangi oleh rasa kurang percaya diri, ketidaktahuan tentang substansi politik, atau kekhawatiran terhadap dampak sosial jika menyampaikan pendapat yang berbeda. Beberapa di antaranya mengungkapkan

ketakutan akan munculnya konflik atau anggapan negatif dari teman sebaya bila terlalu aktif mengekspresikan pandangan politik secara daring.

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial menyediakan ruang yang terbuka dan bebas, namun tidak semua pemilih pemula merasa nyaman memanfaatkannya sebagai media partisipasi politik. Ketakutan akan stigma, kekurangan pengetahuan, serta minimnya pengalaman dalam berdialog politik menjadi penghambat utama keterlibatan mereka. Partisipasi politik di media sosial tidak hanya bergantung pada akses terhadap informasi, tetapi juga pada kesiapan mental dan dukungan sosial yang membentuk keberanian untuk bersuara.

Oleh karena itu, partisipasi politik pemilih pemula melalui media sosial masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Peran edukatif dari sekolah, keluarga, serta penyelenggara pemilu menjadi krusial dalam membangun pemahaman dan kepercayaan diri pemilih muda agar tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga mampu berkontribusi aktif dalam proses demokrasi. Media sosial dapat menjadi ruang partisipasi yang sehat dan produktif apabila didukung dengan literasi politik yang memadai serta lingkungan yang inklusif.

b. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan dalam menyampaikan opini politik melalui media sosial menjadi indikator penting dalam perkembangan budaya demokrasi, terutama di kalangan pemilih pemula. Media sosial dinilai sebagai ruang yang terbuka dan bebas, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk menyuarakan pandangannya, baik dalam bentuk dukungan terhadap calon tertentu maupun kritik terhadap kebijakan politik. Namun, dalam praktiknya, keterbukaan ini tidak serta-merta dapat diwujudkan secara merata oleh seluruh pemilih muda.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian pemilih pemula memanfaatkan media sosial secara aktif untuk menyampaikan opini politik secara terbuka. Mereka merasa bahwa platform digital memberi keleluasaan dalam mengekspresikan pandangan pribadi mengenai program kerja kandidat, arah kebijakan daerah, maupun visi-misi calon pemimpin. Sikap ini muncul karena adanya kenyamanan dalam berinteraksi di lingkungan digital yang suportif, di mana perbedaan pandangan dapat diterima secara wajar selama disampaikan secara santun dan tidak provokatif. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan media sosial dalam mendorong keterbukaan politik di kalangan generasi muda.

Keterbukaan seperti itu tidak berlaku bagi semua pemilih pemula. Sebagian lainnya masih menunjukkan sikap tertutup dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat politik mereka secara daring. Hal ini dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap stigma sosial, tekanan dari lingkungan pertemanan, dan ketakutan akan konflik atau cibiran dari pihak lain. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk menyimpan pendapat pribadi tanpa mengunggahnya ke ruang publik digital, meskipun memiliki pandangan politik yang kuat. Mereka merasa belum cukup siap secara psikologis untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul akibat keterbukaan tersebut.

Selain itu, beberapa pemilih pemula juga menunjukkan sikap enggan untuk terbuka karena merasa belum memiliki keyakinan penuh terhadap pilihan politiknya. Ketidaksiapan ini diperparah oleh lingkungan sosial yang kurang mendukung perbedaan pandangan, sehingga membuat individu merasa tidak nyaman untuk berpendapat secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan dalam media sosial tidak hanya bergantung pada akses dan kebebasan berbicara, tetapi juga pada konteks sosial dan psikologis yang melingkupi individu.

Dengan demikian, meskipun media sosial menyediakan ruang yang luas untuk menyampaikan opini politik, tidak semua pemilih pemula merasa aman dan nyaman untuk memanfaatkannya secara terbuka. Perlu adanya upaya dari berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, serta komunitas lokal untuk membangun lingkungan digital yang inklusif dan mendukung perbedaan pendapat. Pendekatan edukatif yang menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, serta kemampuan berdiskusi secara sehat menjadi kunci dalam mendorong keterbukaan politik yang positif di kalangan generasi muda.

c. Percakapan (*Conversation*)

Percakapan politik di media sosial seharusnya menjadi sarana penting dalam memperkuat demokrasi digital, khususnya bagi pemilih pemula yang hidup di era

teknologi informasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa percakapan politik di kalangan pemuda, khususnya pemilih pemula di Kelurahan Penengahan, masih belum berkembang secara maksimal. Interaksi politik digital belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya komunikasi sehari-hari mereka, meskipun platform seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka.

Faktor yang memengaruhi rendahnya intensitas percakapan politik di media sosial antara lain adalah minimnya keberanian untuk memulai diskusi, ketakutan terhadap respons negatif dari lingkungan sosial, serta persepsi bahwa topik politik masih bersifat sensitif atau bahkan menjemukan. Media sosial memang memberikan ruang terbuka, tetapi ruang ini belum sepenuhnya terasa aman dan inklusif bagi sebagian besar pemilih pemula.

Sebagian pemuda memilih untuk hanya menjadi penonton pasif dalam percakapan politik. Mereka merasa cukup dengan mengakses informasi tanpa perlu menyampaikan opini atau terlibat dalam diskusi terbuka. Bahkan, ketika mereka mencoba menanggapi suatu konten politik, respons yang muncul dari pengguna lain terkadang justru menimbulkan ketidaknyamanan, seperti cibiran atau perdebatan yang tidak sehat. Situasi ini membuat sebagian besar dari mereka cenderung mundur dari percakapan dan memilih untuk diam.

Hal tersebut menunjukkan bahwa percakapan politik di media sosial bukan hanya persoalan keterampilan berkomunikasi, tetapi juga berkaitan erat dengan dukungan sosial dan keberanian individu. Budaya diskusi yang belum tumbuh dengan baik, serta tidak adanya ruang digital yang mendukung dialog politik yang aman dan saling menghargai, menjadi hambatan nyata dalam mendorong partisipasi aktif pemilih pemula.

Penting bagi berbagai pihak seperti sekolah, tokoh masyarakat, komunitas digital, dan penyelenggara pemilu untuk secara aktif menciptakan ruang-ruang diskusi yang terbuka, sehat, dan inklusif. Lingkungan yang suportif dapat menjadi jembatan penting agar pemilih muda tidak hanya sekadar menerima informasi politik, tetapi juga mampu terlibat dalam percakapan yang membangun kesadaran kritis, toleransi, dan keberanian menyuarakan pendapat secara bertanggung jawab.

d. Komunitas (Community)

Minimnya keberadaan komunitas atau forum diskusi yang membahas isu politik menjadi salah satu hambatan dalam menumbuhkan kesadaran politik pemilih pemula di Kelurahan Penengahan. Meskipun media sosial memberikan akses yang luas terhadap informasi politik, pemanfaatan ruang kolektif seperti kelompok diskusi, organisasi pemuda, atau forum tatap muka yang membahas politik masih sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang belajar bersama yang dapat mendorong pemilih muda untuk mengembangkan pemahaman politik secara lebih mendalam.

Kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh lembaga seperti Panwaslu memang pernah diselenggarakan di lingkungan kelurahan, namun kegiatan tersebut cenderung bersifat temporer dan tidak berlanjut menjadi ruang diskusi yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan peserta kegiatan hanya mendapatkan pengetahuan secara sepintas tanpa adanya tindak lanjut yang mampu menjaga minat dan keterlibatan mereka.

Sebagian pemilih pemula sebenarnya menunjukkan minat untuk mengetahui lebih banyak tentang proses politik, terutama menjelang Pilkada. Namun, ketiadaan komunitas atau lingkungan yang mendukung membuat mereka lebih sering mencari informasi secara individual melalui media sosial atau memilih untuk menjadi pengamat pasif. Situasi ini diperburuk oleh persepsi bahwa pembahasan politik dianggap berat, sensitif, atau tidak relevan di kalangan sebaya mereka.

Ketidakhadiran komunitas yang ramah pelajar dan pemilih muda menyebabkan ruang ekspresi dan pertanyaan seputar isu politik tidak tersalurkan dengan baik. Mereka yang memiliki rasa ingin tahu cenderung tidak memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk bertanya atau berbagi pandangan. Akibatnya, interaksi yang seharusnya bisa mendorong tumbuhnya literasi politik justru terhambat.

Penting bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah kelurahan, sekolah, dan organisasi kepemudaan untuk menginisiasi pembentukan komunitas atau ruang diskusi yang bersifat inklusif dan partisipatif. Melalui forum-forum yang dirancang sesuai dengan karakter dan kebutuhan pemilih muda, diharapkan mereka memiliki tempat untuk berdiskusi, bertanya, dan belajar secara kolektif, sehingga keterlibatan politik tidak hanya

bersifat individual, tetapi juga berbasis pada kesadaran komunitas.

e. Keterhubungan (Connectesness)

Keterhubungan dengan informasi politik melalui media sosial telah menjadi realitas dominan bagi pemilih pemula di Kelurahan Penengahan. Platform digital seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp berperan sebagai sumber utama dalam mengakses kabar terkait Pilkada 2024. Kecenderungan ini mencerminkan perubahan pola konsumsi informasi politik, di mana media sosial dianggap lebih cepat, mudah diakses, dan relevan dengan kebiasaan generasi muda.

Namun, keterhubungan tersebut tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Beberapa pemilih pemula memang sudah menunjukkan inisiatif dengan mengikuti akun resmi penyelenggara pemilu maupun media lokal. Mereka memanfaatkan fitur-fitur seperti story dan reels untuk menyerap informasi seputar calon kepala daerah, program kerja, serta dinamika kampanye.

Meskipun demikian, sebagian lainnya masih menjadi pengguna pasif. Informasi politik yang diterima hanya sekilas lalu, tanpa disertai upaya verifikasi atau analisis lebih lanjut. Banyak pemilih muda menyadari adanya informasi yang simpang siur, bahkan mengandung hoaks, namun belum memiliki keterampilan atau kepercayaan diri untuk membedakan informasi yang valid dan tidak. Dalam situasi ini, keterhubungan dengan sumber informasi belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran politik yang utuh, tetapi baru sebatas konsumsi informasi yang sporadis.

Fenomena ini memperlihatkan pentingnya penguatan literasi digital bagi pemilih pemula. Media sosial memang telah memperluas konektivitas informasi politik, namun tanpa dukungan dari lingkungan yang mendorong sikap kritis, keterhubungan tersebut berpotensi menghasilkan pemahaman yang dangkal atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, keterlibatan pihak keluarga, sekolah, dan komunitas lokal menjadi penting dalam memastikan bahwa akses informasi digital dapat mendorong sikap politik yang bertanggung jawab dan reflektif.

2. Bentuk Partisipasi Pemilih Pemula

a. Keterlibatan dalam Kampanye

Kampanye politik merupakan salah satu ruang utama bagi warga negara untuk terlibat dalam proses demokrasi. Bagi pemilih pemula, keterlibatan dalam kampanye dapat menjadi indikator awal munculnya kesadaran politik yang aktif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa partisipasi pemilih pemula dalam kampanye masih bersifat terbatas dan belum menyentuh ranah formal, namun menunjukkan geliat partisipatif yang mulai berkembang, khususnya di ranah digital.

Beberapa pemilih pemula mulai menunjukkan inisiatif dalam mendukung calon kepala daerah dengan cara-cara sederhana namun bermakna. Mereka secara sukarela membagikan ulang informasi kampanye melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Selain itu, aktivitas diskusi ringan yang terjadi di grup pertemanan menjadi sarana informal untuk mengenalkan profil dan program kerja calon tertentu kepada lingkungan sekitarnya. Pola keterlibatan seperti ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi medium yang efektif untuk memfasilitasi keterlibatan politik, meskipun dalam skala yang masih terbatas.

Namun, partisipasi tersebut tidak terjadi secara merata. Masih ditemukan pemilih pemula yang memilih untuk tidak terlibat dalam kampanye karena berbagai pertimbangan. Ada yang merasa belum cukup memiliki pengetahuan tentang calon yang maju, sehingga enggan menyebarkan informasi. Ada pula yang menahan diri karena khawatir akan dianggap memihak atau takut menghadapi respons negatif dari lingkungan sosialnya. Sikap ini menunjukkan bahwa ada hambatan psikologis dan sosial yang menghambat ekspresi politik pemilih muda, meskipun mereka memiliki ketertarikan terhadap isu-isu yang sedang berkembang.

Minimnya keterlibatan ini memperlihatkan bahwa kampanye politik, terutama dalam bentuk formal, belum sepenuhnya menjangkau kalangan pemilih pemula secara efektif. Informasi politik yang tersedia di media sosial cenderung bersifat satu arah, tanpa adanya ruang dialog yang aman dan inklusif. Hal ini membuat sebagian pemilih muda lebih memilih menjadi pengamat pasif daripada partisipan aktif dalam proses kampanye.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kampanye di kalangan pemilih pemula masih berada dalam tahap awal yang perlu diperkuat melalui pendekatan

berbasis komunitas dan pendidikan politik yang kontekstual. Lingkungan sosial yang suportif, pemahaman politik yang sederhana namun aplikatif, serta ruang ekspresi yang aman menjadi kunci dalam mendorong pemilih muda untuk tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga kontributor dalam membentuk kesadaran kolektif menjelang pemilu.

b. Keterlibatan dalam Memberikan Suara

Penggunaan hak suara oleh pemilih pemula merupakan indikator utama dari keterlibatan politik secara formal dalam sistem demokrasi. Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar pemilih pemula di Kelurahan Penengahan telah mengikuti proses pemungutan suara dalam Pilkada 2024. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam hal kesiapan, pemahaman prosedural, serta motivasi di balik partisipasi tersebut.

Beberapa pemilih pemula menunjukkan sikap yang cukup proaktif. Mereka secara sadar mencari informasi terlebih dahulu mengenai tahapan dan tata cara pencoblosan, baik melalui media sosial, berita daring, maupun informasi yang dibagikan di lingkungan sekitar. Bagi mereka, keterlibatan dalam pemilu bukan sekadar formalitas, melainkan pengalaman pertama yang bermakna sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Partisipasi dalam bentuk ini menunjukkan adanya kesadaran politik dasar yang mulai tumbuh, meskipun belum selalu diiringi dengan keterlibatan dalam kampanye atau diskusi politik yang intens.

Terdapat juga pemilih pemula yang hadir ke tempat pemungutan suara dengan persiapan yang minim. Mereka datang ke TPS lebih karena dorongan tanggung jawab moral atau ajakan lingkungan, bukan karena kesadaran politik yang dibentuk dari pemahaman mendalam. Mereka cenderung pasif dalam mencari informasi dan merasa canggung terhadap proses teknis di bilik suara, meskipun akhirnya tetap menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam bentuk pemberian suara belum sepenuhnya dibarengi dengan literasi politik yang memadai.

Sebagian lainnya memang menunjukkan antusiasme dalam menggunakan hak pilih, tetapi keterlibatan tersebut lebih didorong oleh keingintahuan terhadap proses demokrasi, bukan karena keterikatan terhadap calon atau isu politik tertentu. Dalam konteks ini, mereka memilih berdasarkan informasi dasar yang mereka peroleh dari media sosial atau percakapan ringan, tanpa mengikuti kampanye secara aktif. Fenomena-fenomena tersebut mencerminkan bahwa pemberian suara oleh pemilih pemula belum selalu mencerminkan pemilihan yang rasional dan berbasis pemahaman mendalam. Masih ada kesenjangan antara niat untuk berpartisipasi dengan kesiapan untuk melakukannya secara informatif dan bertanggung jawab.

Penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait perlu memberikan perhatian khusus pada pendekatan sosialisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik generasi muda. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan platform digital, kolaborasi dengan sekolah, serta penyelenggaraan forum edukatif yang membahas prosedur teknis hingga pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, keterlibatan pemilih pemula dalam memberikan suara tidak hanya menjadi simbol partisipasi demokratis, tetapi juga mencerminkan kesadaran politik yang matang dan berkelanjutan.

c. Keikutsertaan dalam Mengawasi Pemilu

Pengawasan pemilu merupakan bagian penting dari partisipasi politik non-elektoral yang dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi proses demokrasi. Namun, dalam konteks pemilih pemula di Kelurahan Penengahan, bentuk keterlibatan ini masih belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pemilih pemula belum memiliki pemahaman dan akses yang memadai terhadap peran serta mekanisme pengawasan pemilu.

Beberapa pemilih pemula menunjukkan antusiasme untuk menyaksikan langsung proses pemungutan hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Meski tidak tergabung secara resmi dalam struktur pengawas atau relawan, kehadiran mereka menjadi bentuk keterlibatan pasif yang berkontribusi pada kontrol sosial terhadap proses demokrasi. Keterlibatan ini biasanya didorong oleh rasa ingin tahu atau dorongan pribadi untuk memastikan proses berjalan jujur dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih muda memiliki kepedulian terhadap integritas pemilu, meskipun belum tersalurkan dalam bentuk yang lebih formal dan terstruktur.

Sebagian pemilih pemula hanya terlibat sebatas pada tahap pencoblosan dan tidak melanjutkan keterlibatan pada proses-proses berikutnya. Mereka umumnya belum memahami secara utuh bahwa keikutsertaan dalam pengawasan, baik secara langsung maupun melalui kanal partisipatif yang disediakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, merupakan bagian dari hak sekaligus tanggung jawab warga negara. Sikap pasif ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai cara-cara terlibat dalam pengawasan serta tidak tersedianya ruang edukatif yang mendorong partisipasi aktif.

Minimnya pelibatan kelompok muda oleh penyelenggara pemilu dan kurangnya pendekatan yang menyoar generasi digital turut memperkuat kesenjangan partisipatif ini. Padahal, pemilih pemula dapat menjadi pengawas yang efektif apabila dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai proses dan prosedur pemilu, serta diberikan akses untuk terlibat dalam kanal-kanal pengawasan partisipatif, seperti laporan pelanggaran melalui aplikasi, forum warga, atau keterlibatan langsung dalam komunitas pengawas independen.

Peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilu perlu menjadi perhatian bersama. Dibutuhkan strategi pendidikan politik yang menyoar pemuda secara langsung, baik melalui lembaga pendidikan, komunitas lokal, maupun media sosial. Upaya ini penting tidak hanya untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi yang membentuk warga negara yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap sistem politik di sekitarnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemilih pemula di Kelurahan Penengahan dalam konteks Pilkada 2024 telah membuka peluang baru bagi keterlibatan politik generasi muda. Melalui penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp menjadi platform utama yang digunakan untuk mengakses informasi politik, mengenal calon kepala daerah, hingga terlibat dalam kampanye dan percakapan politik secara digital.

Namun, tingkat pemanfaatan media sosial oleh pemilih pemula belum sepenuhnya maksimal. Terdapat kesenjangan yang nyata antara tingginya intensitas penggunaan media sosial dengan rendahnya kualitas literasi politik, keberanian menyuarakan opini, dan keterlibatan dalam percakapan maupun pengawasan pemilu. Sebagian pemilih pemula menunjukkan partisipasi aktif, seperti membagikan informasi kampanye, berdiskusi dengan teman, dan ikut mengamati proses pemilu. Namun sebagian lainnya masih bersikap pasif karena minimnya pengetahuan, rasa percaya diri yang rendah, dan kekhawatiran terhadap reaksi sosial di lingkungan mereka.

Selain itu, bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula baik dalam kampanye, pemberian suara, maupun pengawasan pemilu masih cenderung bersifat informal dan individual. Minimnya ruang diskusi politik yang inklusif dan terbatasnya komunitas atau forum edukatif membuat pemilih muda kurang mendapatkan wadah yang tepat untuk mengembangkan pemahaman dan keterlibatannya secara kolektif. Hal ini diperparah oleh kurangnya pendekatan dari penyelenggara pemilu maupun institusi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik generasi muda digital.

Dengan demikian, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak—pemerintah kelurahan, penyelenggara pemilu, sekolah, komunitas pemuda, hingga keluarga untuk memperkuat literasi politik dan digital pemilih pemula. Pendekatan edukatif yang kontekstual, ruang diskusi yang aman dan terbuka, serta strategi komunikasi yang dialogis melalui media sosial menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya aktif dalam ruang digital, tetapi juga sadar dan bertanggung jawab dalam membangun demokrasi.

Namun, keberhasilan ini masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan signifikan, terutama dalam hal anggaran yang terbatas untuk pengembangan fasilitas lebih lengkap, minimnya akses dan pemanfaatan teknologi digital, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan ini menjadi tantangan utama yang menghambat pengelolaan wisata agar dapat lebih profesional dan kompetitif di tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah desa, dinas terkait, serta berbagai pihak eksternal sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas SDM, pelatihan teknologi informasi, dan bantuan pendanaan.

Secara keseluruhan, peran BUMDes sebagai penggerak utama dalam pengelolaan wisata mata air Desa Simpang Kanan telah membawa dampak positif yang nyata, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Upaya kolaboratif dan partisipatif yang dijalankan BUMDes tidak hanya memperkuat modal sosial dan memberdayakan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan dukungan yang memadai, potensi wisata desa ini dapat dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Desa Simpang Kanan.

E. Referensi

- Arumsari, E. Y. L., & Nugraheni. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. *Integralistik*, 396(2), 63-72.
- Arumsari, N., Septina, W. E., & Saputro, I. H. (2020). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 5(1), 12-16. <https://doi.org/10.15294/harmony.v5i1.40271>
- Awaliah, A. F., Rahmawati, F., Fadilah, J., Lisda, Judatama, M. N., Syahbani, M. R., Fitriah, N., Solihin, S., Kartini, S., & Firliandoko, R. (2023). Mendorong Partisipasi Politik : Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1087-1092.
- Musa Karim, A., Wibawa, A., & Toko Arisanto, P. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 116-131. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harfa Creative.
- Suryani, E., & Stiawati, T. (2024). Urgensi Manajemen Talenta Dalam Upaya Percepatan Transformasi Organisasi Publik. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 8(1), 40-59. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v8i1.298>
- Suryo, H., & Aji, H. K. (2020). Media Sosial Dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula Dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial). *Research Fair Unisri*, 4(1). <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3390>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>